E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 3938-3949
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Filsafat Keadilan Hakiki: Menantang Budaya Patriarki Lewat Pendidikan Agama Islam Yang Membebaskan

Al-Fahmi Hidayattulah[1], M. Daffa Anugrah[2], M. Rasyid Sahillah Akbar[3], Ahmad Fatahillah[4], Abdurrahmansyah[5]

[1,2,3,4,5]Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail: alfahmihidayattulah@gmail.com[1], anugrahmuhammaddaffa680@gmail.com[2], muhammadrasyidsahillahakbar26@gmail.com[3], ahmadfatahillah4102007@gmail.com [4], abdurrahmansyah73@radenfatah.ac.id [5]

Abstrak

Budaya patriarki masih membentuk relasi gender di keluarga, sekolah, dan ruang publik di Indonesia, sementara pendidikan agama Islam berada pada posisi ganda: ia dapat dipakai untuk melegitimasi hierarki gender, tetapi juga berpotensi membongkarnya. Artikel ini merumuskan keadilan hakiki sebagai landasan filosofis untuk menantang patriarki melalui pendidikan agama Islam yang membebaskan. Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan komparatif terhadap 13 sumber ilmiah (12 artikel jurnal dan satu buku) yang terbit pada 201/–2026. Sumber dibandingkan menurut fokus kajian, desain penelitian, temuan, dan implikasi pedagogisnya. Perbandingan menunjukkan empat hal. Pertama, patriarki bekerja lintas ranah dan paling bertahan di ranah keluarga. Kedua, hambatan pendidikan perempuan tidak pernah berdiri sendiri, sebab patriarki berkelindan dengan ekonomi, adat, dan lingkungan sebaya. Ketiga, otoritas keagamaan yang diwawancarai dalam salah satu studi menolak patriarki yang menindas dan menempatkan akar masalahnya pada kekeliruan tafsir, bukan pada ajaran. Keempat, kajian pendidikan agama Islam tentang pembelajaran berdiferensiasi, kurikulum tersembunyi, dan pendidikan multikultural sudah menyediakan perangkat pedagogis, tetapi belum diarahkan pada isu gender dan pelaksanaannya masih parsial. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendidikan agama Islam yang membebaskan menuntut tafsir kontekstual berbasis maqasid, desain kurikulum yang terintegrasi, pembiasaan nilai keadilan dalam kehidupan sekolah, dan pelatihan pendidik yang peka gender.

Kata kunci: *keadilan hakiki; budaya patriarki; pendidikan agama Islam*

E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 3938-3949
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Abstract

Patriarchal culture continues to shape gender relations in families, schools, and public life in Indonesia, while Islamic religious education occupies a double position: it can legitimise gender hierarchy, yet it can also dismantle it. This article formulates true justice (*keadilan hakiki*) as the philosophical ground for challenging patriarchy through liberating Islamic religious education. It uses a comparative library study of 13 scholarly sources (12 journal articles and one book) published between 201/ and 2026, compared by focus, research design, findings, and pedagogical implications. The comparison shows four things. Patriarchy operates across domains and persists most strongly within the family. Barriers to girls' and women's education never stand alone, because patriarchy is intertwined with economic hardship, custom, and peer influence. Religious authorities interviewed in one study reject oppressive patriarchy and locate the problem in misinterpretation rather than in the teaching itself. Finally, studies of Islamic religious education on differentiated instruction, the hidden curriculum, and multicultural education already supply pedagogical tools, but these have not been directed at gender and their implementation remains partial. The article concludes that liberating Islamic religious education requires contextual, *maqasid*-based interpretation, an integrated curriculum design, the habituation of justice in school life, and gender-sensitive teacher training.

Keywords : *true justice; patriarchal culture; Islamic religious education*

LATAR BELAKANG

Patriarki dipahami sebagai struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal dan pusat dari berbagai aspek kehidupan. Struktur ini tidak berhenti pada pandangan, melainkan menjelma dalam pembagian kerja, pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, dan pengakuan atas kontribusi perempuan(Klerista & Subandi, 2025). Ia juga tidak mudah surut oleh jaminan hukum. Konstitusi menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, tetapi penelitian di berbagai daerah masih menemukan ketimpangan akses antara perempuan dan laki-laki yang bertumpu pada norma budaya dan adat setempat(Herlinda et al., 2026). Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018 mencatat capaian laki-laki sebesar /5,43 dan perempuan 68,63 (Syahputra et al., 2023). Pada ranah keluarga, ketimpangan kuasa itu tampak dalam kekerasan dalam rumah tangga(Modiano, 2021). Hal ini terbukti terus meningkat sekitar 5–10 persen setiap tahun, meskipun negara telah mengatur perlindungannya dengan undang-undang (Anto et al., 2023).

Pendidikan menempati posisi yang genting dalam persoalan ini. Di satu sisi, sekolah dan keluarga adalah tempat pandangan tentang peran gender diwariskan. Pandangan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi karena pada akhirnya akan kembali ke dapur masih ditemukan dan memengaruhi keputusan orang tua. Di sisi lain,

pendidikan adalah jalan keluar yang paling sering dijanjikan. Studi di Desa Netpala, Nusa Tenggara Timur, memperlihatkan bahwa anak perempuan putus sekolah karena rangkaian sebab yang saling terkait, yaitu tekanan ekonomi, persoalan dalam keluarga, ajakan teman sebaya, dan kehidupan budaya patriarki yang masih kentara. Perempuan perkotaan di Surabaya pun menuturkan bahwa kebebasan belajar di luar kota dibatasi dengan alasan keselamatan, sementara saudara laki-lakinya mendapat ruang yang lebih luas (Simbolon & Sunbanu, 2024).

Agama menambah lapisan lain pada persoalan tersebut. Menurut Kartini et al., (2025) menunjukkan bahwa kesalahpahaman atas konsep kepemimpinan laki-laki (*qawamah*) sering melanggengkan patriarki, dan bahwa 83,2 persen mahasiswa yang mereka survei merasa patriarki masih mendominasi masyarakat Muslim. Namun para tokoh agama dari MUI dan NU Jawa Barat yang mereka wawancarai menegaskan bahwa patriarki yang menindas tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan lahir dari kekeliruan tafsir. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa agama bukan sekadar bagian dari masalah, tetapi juga sumber daya untuk menyelesaikannya, asalkan tafsir dan cara mengajarkannya diperbaiki. Pertanyaannya, bagaimana perbaikan itu dilakukan di ruang kelas dan lingkungan belajar?

Di titik inilah kajian pendidikan agama Islam (PAI) relevan. Penelitian tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka memperlihatkan guru PAI mulai memetakan kemampuan dan gaya belajar peserta didik, tetapi pelaksanaannya masih parsial dan sering disalahpahami sebagai pengelompokan gaya belajar semata. Penelitian di pesantren menunjukkan bahwa nilai dapat ditanamkan tanpa diajarkan secara eksplisit, yaitu melalui norma, kebiasaan, dan budaya yang dihidupi sehari-hari. Kajian tentang pendidikan multikultural menawarkan desain kurikulum dan pembelajaran yang integratif untuk menanamkan penghargaan terhadap keragaman. Ketiganya menyimpan perangkat yang dapat dipakai untuk membongkar patriarki, tetapi tak satu pun membahas gender secara langsung. Sebaliknya, kajian tentang patriarki jarang masuk ke dalam rancangan pembelajaran PAI. Celah antara dua kelompok kajian inilah yang hendak dijembatani.

Artikel ini menyebut jembatan itu keadilan hakiki. Istilah ini dipakai untuk membedakan keadilan yang substantif dari keadilan yang berhenti pada kesetaraan formal. Akses terhadap sekolah dan pekerjaan belum otomatis menjadi kebebasan yang nyata, sebab perubahan itu bergantung pada ekosistem kelembagaan yang mengakui suara dan otoritas perempuan. Keadilan hakiki dengan demikian bertanya lebih jauh: bagaimana tafsir ajaran ditafsirkan, bagaimana relasi dibiasakan, dan bagaimana peserta didik diposisikan sebagai subjek, bukan objek, dalam pendidikannya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana penelitian-penelitian terdahulu menggambarkan bentuk dan mekanisme budaya patriarki? Kedua, perangkat pedagogis apa yang telah ditawarkan oleh kajian PAI dan sejauh mana perangkat itu menyentuh isu gender? Ketiga, bagaimana keadilan hakiki dapat dirumuskan sebagai landasan bagi PAI yang membebaskan? Kontribusi artikel ini adalah sintesis komparatif yang mempertemukan dua kelompok

kajian yang selama ini berjalan terpisah, sekaligus menawarkan kerangka filosofis dan arah praktis bagi pendidik.

KAJIAN LITERATUR

Patriarki sebagai struktur dan budaya

Dalam literatur yang dikaji, patriarki dirumuskan sebagai struktur yang memusatkan otoritas pada laki-laki, terutama di dalam keluarga, lalu meluas menjadi budaya masyarakat dan budaya bernegara. Walby, sebagaimana dikutip dalam buku bunga rampai itu, memandangnya sebagai sistem struktur sosial dan praktik yang memosisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Karena itu, patriarki tidak cukup dipahami sebagai sikap pribadi yang menyimpang. Ia adalah tatanan yang diwariskan lewat sosialisasi di keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Wujudnya dapat dibaca melalui empat indikator yang dipakai dalam studi di Kampar, yaitu marginalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan. Kajian pustaka tentang politik dan rumah tangga memperlihatkan bahwa wujud itu hadir bersamaan di ranah politik dan rumah tangga. Perempuan terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan, sementara di rumah ia dibebani fungsi domestik dan dituntut tunduk pada keputusan suami. Kajian yuridis normatif tentang kekerasan dalam rumah tangga menautkan posisi superior laki-laki itu dengan perilaku sewenang-wenang yang berujung pada kekerasan. Meski demikian, patriarki tidak menghasilkan korban yang pasif. Studi fenomenologis di Surabaya menegaskan bahwa perempuan juga memaknai, menanggapi, bahkan menentang struktur tersebut, dan analisis wacana kritis atas sebuah novel membaca hal serupa dalam tokoh perempuan utamanya, yang menjadi subjek sekaligus objek kekerasan budaya.

Keadilan hakiki dalam tradisi pemikiran Islam

Dalam pengertian umum pemikiran Islam, keadilan (*adl*) bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pengertian ini tidak sama dengan memperlakukan semua pihak secara identik, melainkan memberi apa yang menjadi hak dan martabat masing-masing. Kajian di pesantren Palembang mencatat *adl* bersama *tawassut*, *tawazun*, *tasammuh*, dan *tasyawur* sebagai karakteristik yang sejak awal melekat pada pesantren. Studi di Jawa Barat lebih jauh menawarkan hermeneutika berbasis *maqasid* yang berporos pada keadilan, *rahmah*, dan perlindungan martabat. Dalam bacaan itu, *qawwam* pada QS An-Nisa ayat 34 dipahami sebagai amanah tanggung jawab, bukan lisensi superioritas, dan kekerasan dipandang bertentangan dengan prinsip *rahmah*.

Berangkat dari bahan tersebut, artikel ini merumuskan keadilan hakiki sebagai keadilan yang substantif dalam tiga lapis. Lapis pertama menyangkut sumber tafsir, yakni pembacaan teks yang berpihak pada martabat manusia. Lapis kedua menyangkut struktur, yakni akses formal yang terus diubah menjadi kebebasan yang sungguh dapat dipakai. Lapis ketiga menyangkut kebiasaan, yakni keadilan yang tampak dalam relasi sehari-hari di rumah, kelas, dan lembaga. Rumusan ini merupakan

formulasi kerja penulis yang disusun dari sumber-sumber di atas, bukan definisi baku dari satu penulis.

Pendidikan agama Islam yang membebaskan

Pendidikan yang membebaskan dalam artikel ini diartikan sebagai pendidikan yang memposisikan peserta didik sebagai subjek yang mampu memaknai, mengkritisi, dan mengubah ketimpangan yang dialaminya. Pengertian ini sejalan dengan temuan tentang agensi perempuan. Dalam konteks PAI, setidaknya tiga kerangka pedagogis dalam kajian terdahulu dapat dibaca sebagai perangkat pembebasan.

Kerangka pertama adalah kurikulum dan pembelajaran integratif. Kajian pendidikan multikultural menyatakan bahwa Islam memiliki akar pendidikan multikultural yang kuat dan bahwa nilai *rahmatan lil 'alamin* perlu dikembangkan lewat desain kurikulum dan pembelajaran yang terpadu. Keberhasilannya ditopang oleh sikap terbuka guru, ketersediaan bahan ajar, lingkungan sekolah yang mendukung, dan pelatihan guru berwawasan multikultural. Kerangka kedua adalah kurikulum tersembunyi. Menurut kajian kurikulum tersembunyi, nilai-nilai moderasi seperti toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan tertanam melalui kebiasaan dan budaya pesantren, dengan tahapan analisis kebutuhan, pengembangan kegiatan, dan pelatihan ustaz serta staf. Kerangka ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kajian pembelajaran berdiferensiasi menemukan bahwa guru PAI sudah memetakan gaya belajar dan kemampuan serta menyusun modul adaptif, tetapi diferensiasi isi dan produk belajar masih terbatas, dan terdapat jarak antara rencana dalam modul dengan praktik di kelas.

Penelitian terdahulu dan celah kajian

Penelitian tentang patriarki dalam sumber yang dikaji memakai desain yang beragam. Pendekatan kuantitatif dipakai melalui survei deskriptif, analisis korelasi dan regresi dengan data provinsi, serta regresi sederhana atas data kuesioner. Pendekatan kualitatif dipakai dalam studi tentang putus sekolah dan pengalaman perempuan, metode campuran dalam studi tentang tafsir dan psikologi, studi pustaka dalam kajian politik, rumah tangga, dan hukum, serta analisis wacana kritis atas sebuah novel. Satu buku bunga rampai menghimpun bab-bab tentang peran, diskriminasi, perlawanan, dan akses pendidikan perempuan.

Dari seluruh kajian itu, hanya satu studi, yaitu penelitian metode campuran di Jawa Barat, yang menghubungkan patriarki secara eksplisit dengan tafsir keagamaan dan kurikulum pendidikan Islam. Di sisi lain, tiga kajian PAI yang dirujuk tidak membahas gender sama sekali. Celah ini menjadi alasan dipilihnya studi perbandingan: dua kelompok literatur perlu dibaca berdampingan agar tampak apa yang sudah ada, apa yang belum, dan bagaimana keduanya dapat dipertemukan.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data berupa teks ilmiah yang dianalisis dan dibandingkan, sehingga tidak ada pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut pembacaan lintas studi untuk melihat pola, perbedaan, dan celah, serta karena metode kajian pustaka juga dipakai oleh sebagian sumber yang dikaji.

Sumber ditetapkan secara purposif berdasarkan kesesuaian dengan dua tema, yaitu budaya patriarki dan pendidikan agama Islam, serta tahun terbit 201/ sampai 2026. Korpus akhir terdiri atas 13 sumber. Sepuluh di antaranya membahas patriarki dari sudut keluarga, kekerasan, pendidikan, politik, wacana sastra, pengalaman perempuan, dan tafsir keagamaan, yaitu sembilan artikel jurnal dan satu buku bunga rampai. Tiga lainnya adalah artikel tentang PAI yang membahas pembelajaran berdiferensiasi, kurikulum tersembunyi, dan pendidikan multikultural. Komposisi ini disengaja agar dua kelompok kajian dapat dibandingkan.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama, setiap sumber dibaca penuh, lalu dicatat tujuan, desain dan subjek penelitian, lokasi, temuan utama, dan implikasinya. Tahap kedua, catatan itu dikelompokkan ke dalam tema, yaitu bentuk patriarki, mekanisme yang melestarikannya, ruang pendidikan, peran tafsir keagamaan, dan perangkat pedagogis. Tahap ketiga, sumber-sumber dalam satu tema dibandingkan secara konstan untuk mencari persamaan, perbedaan, dan kemungkinan penjelasan atas perbedaan itu, termasuk perbedaan yang muncul akibat desain penelitian. Tahap keempat, hasil perbandingan disintesis dengan kerangka keadilan hakiki untuk merumuskan konsekuensinya bagi PAI.

Perbandingan memperhatikan lima dimensi, yaitu fokus dan konteks, desain penelitian, temuan tentang bentuk dan mekanisme patriarki, ruang atau peran pendidikan agama, serta implikasi pedagogis. Untuk menjaga keabsahan, setiap klaim dalam pembahasan dikembalikan ke pernyataan penulis sumber, angka dikutip sebagaimana tertulis, dan temuan dari desain berbeda tidak digeneralisasi satu sama lain. Hasil disajikan dalam kelompok tema, bukan sumber demi sumber, sehingga pembaca dapat melihat pola lintas studi.

Metode ini memiliki keterbatasan. Korpus terbatas pada 13 sumber dan tidak mewakili seluruh literatur. Ukuran sampel dan konteks sumber sangat berbeda, misalnya survei terhadap 15 perempuan di satu desa dibandingkan dengan analisis seluruh provinsi di Indonesia, sehingga hasil perbandingan bersifat tematik dan bukan statistik. Karena itu, kesimpulan artikel ini diperlakukan sebagai rumusan konseptual yang perlu diuji dalam penelitian lapangan di kelas PAI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk patriarki dan ranah yang paling bertahan

Seluruh sumber tentang patriarki sepakat bahwa patriarki hadir sebagai gabungan marginalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan, tetapi intensitasnya berbeda menurut ranah. Pada tingkat negara dan pembangunan, gambarannya relatif membaik. Analisis Dewi & Suwandana, (2024) atas data provinsi tahun 2022 menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar perempuan di sekolah menengah atas dan perguruan tinggi telah melampaui laki-laki, dan proporsi perempuan di antara aparatur sipil negara pun lebih besar. Pada tingkat keluarga, gambaran itu berbalik. Korelasi antara indeks pembangunan gender dan jumlah kekerasan dalam rumah tangga bernilai negatif sedang, yaitu −0,358, yang berarti semakin rendah indeks itu semakin tinggi angka kekerasan. Penulisnya mengingatkan

bahwa indeks tersebut menjelaskan kurang dari separuh variasi kekerasan dan bukan ukuran patriarki yang menyeluruh.

Studi kuantitatif di Desa Tarai Bangun, Kampar, memperlihatkan pola yang lebih bernuansa. Skor budaya patriarki ibu rumah tangga berada pada kategori sedang dengan rerata 3,45, dan kesetaraan gender juga sedang dengan rerata 3,46. Analisis regresi menunjukkan bahwa patriarki berpengaruh signifikan dengan kontribusi 29,4 persen, sedangkan /0,6 persen ditentukan faktor lain. Penulisnya sendiri meminta agar arah hubungan positif antara kedua variabel ditafsirkan hati-hati, sebab dapat dipengaruhi oleh konstruksi dan skoring instrumen atau oleh konteks sosial yang sedang bertransisi. Kajian pustaka tentang politik dan rumah tangga menyebut dominasi laki-laki sebagai penyebab ketimpangan peran, beban ganda, dan terhambatnya pengembangan diri perempuan, sementara kajian yuridis normatif menempatkan patriarki sebagai salah satu faktor utama kekerasan dalam rumah tangga.

Pendidikan perempuan dan jalinan sebab penghambatnya

Survei terhadap 15 perempuan di Desa Bontoraja, Bulukumba, menunjukkan pandangan yang terbelah. Sebanyak 40 persen responden setuju dan 40 persen tidak setuju bahwa akses pendidikan telah setara, sedangkan 20 persen netral. Sebanyak 33,3 persen sangat setuju bahwa orang tua mendukung pendidikan anak perempuan, dan 26,/ persen tidak setuju. Penulisnya menyimpulkan bahwa norma budaya dan adat setempat masih memengaruhi keputusan orang tua. Bab tentang akses pendidikan dalam buku bunga rampai yang dikaji menyatakan hal serupa: dalam keluarga dengan keterbatasan keuangan, pendidikan lebih sering diprioritaskan untuk anak laki-laki.

Studi kualitatif di Desa Netpala, Nusa Tenggara Timur, melibatkan 12 informan, yaitu lima perempuan yang putus sekolah, lima orang tua mereka, pemerintah desa, dan tokoh adat. Penyebab putus sekolah yang ditemukan berlapis: biaya sekolah, persoalan dalam lingkungan keluarga, dan ajakan teman sebaya untuk bekerja di kota. Satu informan berhenti sekolah setelah orang tuanya mengetahui ia berpacaran. Di Surabaya, penelitian fenomenologis oleh Maghfiro & Sadewo, (2025) terhadap lima perempuan berusia 20–30 tahun menemukan bentuk pembatasan yang lebih halus. Seorang informan tidak diizinkan mengikuti organisasi sementara saudara laki-lakinya didukung penuh, bahkan mengikuti pelatihan kepemimpinan, dan informan lain tidak boleh berkuliah di luar kota karena dianggap lemah.

Tafsir keagamaan sebagai sumber legitimasi dan koreksi

Studi metode campuran di Jawa Barat memberikan satu-satunya data dalam korpus yang menghubungkan patriarki dengan tafsir. Dari 101 mahasiswa, 83,2 persen merasa patriarki masih mendominasi masyarakat Muslim. Wawancara dengan tokoh MUI dan NU menghasilkan sikap yang berlawanan dengan persepsi itu: patriarki yang menindas tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, dan akarnya adalah kekeliruan tafsir. Ayat tentang *qawwam* (QS An-Nisa: 34) disebut sebagai simpul kekeliruan itu, karena kepemimpinan laki-laki dibaca sebagai lisensi superioritas padahal ia amanah nafkah dan perlindungan, dan frasa tentang “memukul” dipakai untuk membenarkan kekerasan padahal bertentangan dengan prinsip *rahmah*. Dosen psikologi yang

diwawancarai memandang gender sebagai konstruksi sosial yang dibentuk pendidikan dan lingkungan, serta menyebut tiga mekanisme psikologis yang menormalkan pembatasan peran, yaitu pembenaran moral, bias keinginan sosial, dan internalisasi norma. Kekeliruan tafsir itu, menurut studi tersebut, beredar melalui kurikulum yang miskin dialog gender, khutbah yang mengulang narasi hierarkis, dan metode fatwa yang belum berorientasi pada kemaslahatan kontemporer.

Agensi dan perlawanan perempuan

Studi di Surabaya juga memperlihatkan bahwa kelima informan memaknai patriarki dari pengetahuan sosial yang diwariskan sejak kecil, tetapi tidak semuanya menerimanya. Dua informan memilih mengikuti peran yang ada demi keharmonisan keluarga atau karena merasa tak mampu menolak. Tiga lainnya bersikap kritis dan melawan, misalnya dengan melanjutkan kuliah meskipun dilarang orang tua atau mengakhiri hubungan dengan pasangan yang tidak menghargai kemandiriannya. Informan yang melawan umumnya memiliki kesadaran gender yang lebih tinggi melalui keterlibatan dalam organisasi, bacaan feminis, atau lingkungan yang mendukung.

Pola serupa muncul dalam analisis wacana kritis model Sara Mills atas novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* karya Dian Purnomo. Tokoh Magi berposisi sebagai subjek karena ia mendefinisikan dirinya dan bebas mengungkapkan kemarahannya, tetapi juga sebagai objek karena berulang kali menjadi sasaran kekerasan laki-laki, budaya, dan keluarganya dalam latar tradisi kawin tangkap di Nusa Tenggara Timur, hingga ia memberontak terhadap semua yang menindasnya (Mutmainnah, 2026).

Perangkat pedagogis dalam kajian pendidikan agama Islam

Tiga kajian PAI yang dibandingkan tidak membahas gender, tetapi masing-masing menawarkan perangkat yang relevan. Studi kasus ganda oleh Churairoh et al., (2025) di MTs Al-Azhar Center Baturaja dan SMP Negeri 1 OKU melibatkan 15 guru PAI kelas VIII. Guru telah memetakan gaya belajar dan kemampuan peserta didik, menyusun modul ajar adaptif, dan memakai strategi bervariasi yang dipadukan dengan nilai keagamaan. Namun pembelajaran berdiferensiasi sering dipahami sebatas pengelompokan gaya belajar, diferensiasi isi dan produk masih terbatas, dan terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Hambatan utamanya ialah pemahaman konsep yang parsial, literasi digital yang rendah, dan keterbatasan sarana. Penulisnya menilai pelaksanaannya masih dangkal dan terfragmentasi, sehingga memerlukan dukungan kelembagaan dan pengembangan profesional guru.

Penelitian fenomenologis Amin et al., (2024) di Pondok Pesantren Modern Al-Fahd Jakabaring, Palembang, memakai observasi partisipatif, wawancara semiterstruktur dengan pimpinan, guru, dan santri, serta dokumentasi. Nilai moderasi seperti toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan ditanamkan tanpa diajarkan secara eksplisit, yaitu melalui keteladanan ustaz dan staf, kegiatan keagamaan yang inklusif seperti zikir dan doa bersama, kegiatan sosial dan gotong royong, serta kebersamaan seperti makan bersama. Tahapannya mencakup analisis kebutuhan, pengembangan kurikulum tersembunyi, dan pelatihan ustaz serta staf. Adapun Abdurrahmansyah, (2017) menyatakan bahwa Islam memiliki akar pendidikan

multikultural yang kuat dan bahwa nilai *rahmatan lil 'alamin* perlu dikembangkan melalui desain kurikulum dan pembelajaran yang integratif, dengan faktor pendukung berupa sikap terbuka guru, bahan ajar, lingkungan sekolah, dan pelatihan guru berwawasan multikultural.

Pembahasan

Patriarki yang berpindah ranah, bukan hilang

Perbandingan antara data provinsi dan data keluarga menunjukkan bahwa membaiknya capaian formal tidak otomatis berarti patriarki berkurang di tempat ia paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perempuan memang lebih banyak mengisi bangku sekolah menengah, perguruan tinggi, dan jabatan aparatur negara, tetapi di dalam keluarga kekerasan tetap tinggi di wilayah yang indeks pembangunan gendernya rendah, dan di Kampar kesetaraan dan patriarki hidup berdampingan pada tingkat sedang. Dalam kerangka keadilan hakiki, ini adalah persoalan lapis kedua: akses formal belum menjadi kebebasan yang sungguh dapat dipakai. Cukup beralasan bila hasil di Kampar dibaca sebagai tanda masyarakat yang sedang bertransisi, dan bukan sebagai bukti bahwa patriarki membawa kesetaraan, mengingat penulisnya sendiri menandai kemungkinan masalah pada instrumen.

Hambatan yang berlapis dan pelajaran dari kurikulum tersembunyi

Studi tentang pendidikan memperlihatkan bahwa patriarki jarang tampil dengan nama itu. Ia tampil sebagai alasan biaya, keselamatan, kepantasan, atau tradisi. Di Netpala penyebab yang dicatat adalah ekonomi, keluarga, dan teman sebaya, di Bulukumba adalah norma adat, dan di Surabaya adalah kekhawatiran akan kelemahan perempuan. Karena itu, penelitian yang hanya menghitung patriarki sebagai satu variabel akan selalu menemukan bahwa ia hanya menjelaskan sebagian, sebagaimana tampak pada kontribusi 29,4 persen di Kampar. Patriarki lebih tepat dipahami sebagai cara berbagai tekanan ditafsirkan dan dibagi, dan inilah yang membuatnya sulit dikenali dan sulit dilawan.

Di titik ini, temuan tentang kurikulum tersembunyi di pesantren menjadi penting. Jika toleransi dapat tumbuh dari keteladanan, kebiasaan, dan kegiatan bersama tanpa diajarkan secara eksplisit, mekanisme yang sama bekerja pula untuk menanamkan hierarki. Anak perempuan yang sejak kecil melihat ayah memutuskan segalanya, atau diminta mengerjakan semua pekerjaan rumah tanpa saudara laki-lakinya, sedang belajar dari kurikulum tersembunyi di rumah. Sekolah dan lembaga PAI tidak netral terhadap proses itu. Pertanyaannya bukan apakah mereka mengajarkan relasi gender, melainkan relasi apa yang mereka ajarkan melalui pembagian tugas, teladan guru, dan cara berunding.

Tafsir sebagai simpul dan jarak antara ajaran dan praktik

Kontras antara persepsi mahasiswa dan sikap tokoh agama dalam studi Jawa Barat mengungkap jarak antara apa yang dinyatakan otoritas dan apa yang dialami peserta didik. Jika tokoh MUI dan NU benar bahwa patriarki yang menindas bukan ajaran, maka sumber persoalan terletak pada jalur penyampaian, yaitu kurikulum, khutbah, dan fatwa. Inilah lapis pertama keadilan hakiki, yakni tafsir yang berpihak pada martabat. Hermeneutika berbasis *maqasid* yang menekankan keadilan, *rahmah*, dan

perlindungan martabat memberi pegangan untuk membaca ulang *qawwam* sebagai amanah dan bukan hak istimewa. Namun temuan pada pembelajaran berdiferensiasi mengingatkan bahwa gagasan yang tepat dapat tereduksi menjadi teknik. Bila guru PAI menyamakan diferensiasi dengan pengelompokan gaya belajar, pendidikan yang peka gender pun berisiko dipahami sebatas materi tambahan atau satu kali ceramah, tanpa mengubah cara kelas dikelola.

Dari perangkat pedagogis ke pendidikan yang membebaskan

Ketiga perangkat dalam kajian PAI dapat dipetakan pada tiga lapis keadilan hakiki. Desain kurikulum dan pembelajaran yang integratif melayani lapis tafsir. Tema keadilan, *rahmah*, dan kesetaraan martabat dapat dihadirkan di berbagai mata pelajaran PAI, seperti akidah akhlak, fikih, Al-Qur'an dan hadis, serta sejarah, tidak hanya dalam satu bab tentang keluarga. Pembelajaran berdiferensiasi melayani lapis struktur. Pemetaan kesiapan, minat, dan profil peserta didik memungkinkan guru melihat siapa yang terbebani pekerjaan rumah, siapa yang jarang diberi kesempatan berbicara, dan siapa yang tidak diharapkan memimpin, lalu menyesuaikan tugas dan penilaian sehingga akses benar-benar dapat dipakai. Kurikulum tersembunyi melayani lapis kebiasaan. Keteladanan guru, kegiatan keagamaan yang inklusif, gotong royong, dan musyawarah yang memberi ruang setara kepada putri dan putra melatih keadilan sebagai laku, bukan hanya konsep.

Semua perangkat itu bergantung pada pendidik. Kajian multikultural menyebut sikap terbuka dan pelatihan guru sebagai faktor pendukung, kajian pesantren menjadikan pelatihan ustaz bagian dari tahapan, kajian diferensiasi menyimpulkan perlunya pengembangan profesional, dan studi Jawa Barat merekomendasikan literasi tafsir bagi khatib dan pendidik. Dengan demikian, keadilan hakiki dalam PAI bukan hanya tugas menyusun materi, melainkan tugas membentuk pendidik yang mampu membaca teks secara kontekstual dan menata relasi di kelas secara adil.

Perempuan sebagai subjek dan keterlibatan laki-laki

Pendidikan yang membebaskan perlu menempatkan perempuan sebagai subjek. Studi di Surabaya menunjukkan bahwa perlawanan tumbuh dari kesadaran gender yang dibentuk lewat organisasi, bacaan, dan lingkungan yang mendukung, dan analisis novel memperlihatkan bahwa menjadi subjek dan menjadi objek kekerasan dapat terjadi pada orang yang sama. Artinya, sekolah perlu menyediakan ruang berorganisasi, kegiatan membaca kritis, dan lingkungan yang aman bagi peserta didik perempuan, tanpa membebankan perubahan hanya kepada mereka. Studi di Kampar menyarankan pelibatan laki-laki dalam pendidikan kesetaraan, dan kajian tentang politik dan rumah tangga menegaskan bahwa laki-laki juga dirugikan oleh peran gender yang kaku. Karena itu, PAI yang membebaskan berlaku bagi semua peserta didik.

Keterbatasan dan arah penelitian lanjutan

Perbandingan ini bersifat konseptual dan bertumpu pada 13 sumber dengan konteks dan ukuran sampel yang sangat berbeda. Tidak ada satu pun studi yang meneliti kelas PAI dari sudut pandang gender, sehingga pemetaan perangkat pedagogis pada lapis keadilan hakiki merupakan usulan yang perlu diuji. Penelitian lanjutan dapat menguji secara empiris model kurikulum tafsir kontekstual,

pembelajaran berdiferensiasi yang peka gender, dan pembiasaan relasi setara di sekolah atau pesantren. Studi kuantitatif juga dapat memperbaiki ukuran patriarki, misalnya dengan indeks praktik budaya patriarki dalam keluarga sebagaimana diusulkan dalam studi data provinsi, serta memeriksa ulang instrumen yang arah skoringnya dipertanyakan.

SIMPULAN

Artikel ini membandingkan 13 sumber untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, patriarki dalam penelitian terdahulu tampil sebagai gabungan marginalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan yang membaik di tingkat negara tetapi bertahan di tingkat keluarga. Ia jarang berdiri sendiri, sebab berjalin dengan ekonomi, adat, dan pengaruh sebaya, sehingga tampil sebagai alasan yang tampak wajar. Kedua, kajian pendidikan agama Islam menyediakan tiga perangkat, yaitu kurikulum dan pembelajaran yang integratif, pembelajaran berdiferensiasi, dan kurikulum tersembunyi, tetapi belum satu pun diarahkan pada isu gender dan pelaksanaannya masih parsial. Ketiga, keadilan hakiki dirumuskan sebagai keadilan yang substantif dalam tiga lapis, yaitu tafsir yang berpihak pada martabat, akses yang berubah menjadi kebebasan, dan keadilan yang dibiasakan dalam relasi sehari-hari.

Dengan rumusan itu, pendidikan agama Islam yang membebaskan memerlukan tafsir kontekstual berbasis *maqasid*, desain kurikulum yang memasukkan nilai keadilan di seluruh mata pelajaran, pembelajaran yang memetakan kebutuhan peserta didik perempuan dan laki-laki, pembiasaan relasi setara melalui keteladanan dan kegiatan bersama, serta pelatihan pendidik yang peka gender. Rumusan ini bersifat konseptual dan perlu diuji melalui penelitian lapangan di kelas PAI dan pesantren. Bagi pendidik, langkah pertama yang paling mungkin dilakukan adalah memeriksa kurikulum tersembunyi di sekolahnya sendiri: siapa yang diminta memimpin, siapa yang diminta melayani, dan tafsir apa yang dibiarkan tidak dipertanyakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmansyah, A. (2017). Pendidikan multikultural dalam desain kurikulum dan pembelajaran keagamaan Islam. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, *21*(1), 79–88.

Amin, K., Abdurrahmansyah, A., & Fauzi, M. (2024). Internalization of Religious Moderation Values through Hidden Curriculum at Pondok Pesantren Modern Al-Fahd Jakabaring Palembang. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, *13*(1), 148–163.

Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., … Mendo, A. Y. (2023). Perempuan, masyarakat, dan budaya patriarki. *Penerbit Tahta Media*.

Churairoh, C., Abdurrahmansyah, A., Handayani, T., & Wigati, I. (2025). Implementing Differentiated Instruction in Islamic Religious Education under the Merdeka Curriculum: A Comparative Case Study at Islamic and Public Junior Secondary Education. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, *17*(4), 7013–7022.

Dewi, N. P. A. M., & Suwandana, E. (2024). *How Does Patriarchy Contribute To Domestic Violence In Indonesia? Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, *23*(1), 15–28.

Herlinda, F., Ayub, D., & Fitrilinda, D. (2026). Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kesetaraan Gender Ibu Rumah Tangga di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, *12*(2), 567–575.

Kartini Galih Khalisa; Handini, Meyta Nisa; Kamilah, Safina; Anwar, Saepul, K. Q. (2025). Membongkar Budaya Patriarki: Rekonstruksi Pemahaman Peran Gender Berdasarkan Perspektif Islam dan Psikologi. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, (Vol. 6 No. 1 (2025): December 2025), 1–22. Retrieved from https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/azzahra/article/view/35788/15858

Klerista, T., & Subandi, Y. (2025). Dampak budaya patriarki terhadap kaum perempuan dalam aspek politik dan rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, *3*(6), 350–357.

Maghfiro, R. A., & Sadewo, F. X. S. (2025). Pengalaman Perempuan dalam Menghadapi Budaya Patriarki. *Paradigma*, *14*(1), 121–130.

Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sapientia Et Virtus*, *6*(2), 129–140.

Mutmainnah, F. (2026). Budaya Patriarki Dan Pemberontakan Perempuan (Analisis Wacana Kritis Sara Mills). *Anafora: Jurnal Penelitian Mahasiswa Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *6*(1), 216–227.

Simbolon, G., & Sunbanu, B. A. (2024). Perempuan dan Budaya Patriarki terhadap Angka Putus Sekolah (Studi Kasus Di Desa Netpala, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *5*(10).

Syahputra, D. D., Bangun, M. B., & Handayani, S. M. (2023). Budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba. *Sustainable*, *6*(2), 608–616.